

Pelatihan Pembuatan Proposal Kegiatan untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat di Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar

Syarifuddin
Universitas Hasanuddin

Ratna Ayu Damayanti
Universitas Hasanuddin

Mahlia Muis
Universitas Hasanuddin

Cepi Pahlevi
Universitas Hasanuddin

Abstract

The purpose of the community service is to encourage community efforts to put their ideas into writing or proposals, which will be submitted in the mechanism of the development planning process. In other words, the community's ideas will be in line with the government's development vision and mission thus the ideas contained in the proposal can be accepted by the regional government. The impact of this service is the active participation of villagers in development planning increased. The method used is focus group discussion. Village communities, in this case, are gathered to discuss issues about their ideas about development which then are jointly put into activity proposals. The completed activity proposals are then proposed to the village government. The findings of this service are that the community needs skills in preparing qualified proposals. Therefore, efforts of this kind need to be continuously encouraged and improved.

Keywords: *Development planning; Focus group discussion; Participation; Proposal; Village community*

Abstrak

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendorong upaya masyarakat dalam menuangkan ide-ide pemikirannya ke dalam bentuk tulisan atau proposal yang akan diajukan dalam mekanisme proses perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, agar ide masyarakat sejalan dengan visi dan misi pembangunan pemerintah sehingga ide yang tertuang dalam proposal dapat diterima oleh pemerintah daerah. Dampak dari pengabdian ini adalah partisipasi aktif masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan dapat meningkat. Metode yang digunakan adalah *focus group discussion*. Masyarakat desa, dikumpulkan untuk membicarakan isu tentang ide dan gagasan mereka tentang pembangunan yang selanjutnya secara bersama-sama menuangkannya ke dalam proposal kegiatan. Proposal kegiatan yang telah selesai, kemudian, diusulkan kepada pemerintah desa. Temuan pengabdian ini adalah masyarakat sangat membutuhkan keterampilan dalam menyusun proposal yang mumpuni. Karenanya, upaya semacam ini perlu terus untuk digalakkan dan ditingkatkan.

Kata kunci: *Focus group discussion; Masyarakat desa; Partisipasi; Perencanaan pembangunan; Proposal*

1. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat selalu menjadi pusat perhatian dalam praktik pembangunan di hampir setiap negara [1], [2] dan pada dekade 80-an, Pemerintah Indonesia telah mendorong partisipasi masyarakat di tingkat desa. Hal ini tercermin dalam pengenalan perencanaan desentralisasi dan penciptaan struktur kelembagaan partisipatif melalui reformasi ekonomi yang dimulai pada awal tahun 90-an. Sebagian besar daerah di Indonesia, karenanya, menerapkan partisipasi masyarakat dan pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar ke daerah terkait isu partisipasi. Pada tahun 2004, partisipasi diberlakukan sebagai misi pembaharuan pedesaan dan merupakan bagian dari reformasi yang dicanangkan pemerintah. Menurut data yang diungkapkan [2], pemerintah daerah Indonesia telah memberlakukan *musrenbang* yang

melibatkan *konsultasi pemangku kepentingan* pada tingkat desa dan hal ini diperkuat lagi dengan adanya otonomi desa sehingga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun aktivitas desa. Kondisi ini membutuhkan persiapan kerangka perencanaan desa partisipatif yang matang dan melibatkan warga. Pemerintah sadar bahwa partisipasi masyarakat dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan melibatkan struktur kelembagaan melalui proses perencanaan. Namun, tidak demikian dengan Desa Bontoparang, partisipasi masyarakat mengalami kendala karena umumnya mereka kurang memahami apa yang harus dilakukan untuk dapat berpartisipasi, contohnya masyarakat kurang mampu untuk menuangkan gagasan ke dalam bentuk usulan (proposal) kepada pemerintahan desa/penyanggah dana agar aktivitas mereka dapat didanai, meskipun usulan dalam bentuk yang sangat sederhana. Padahal Desa Bontoparang sangat potensial untuk dikembangkan namun pengetahuan masyarakatnya mengenai perencanaan masih kurang. Di sini lah pentingnya untuk melakukan pelatihan.

Partisipasi publik dalam perencanaan desa telah ada sejak desa membuat perencanaan anggaran untuk melaksanakan pembangunan, namun bentuknya masih berupa diskusi dan saran pada tahap persiapan, seperti penggunaan lahan di beberapa desa atau persiapan rancangan anggaran pembangunan desa. Namun, pada dekade terakhir, tuntutan pelibatan masyarakat semakin meningkat dan berbagai bentuk partisipasi bermunculan seperti *konsultasi pemangku kepentingan* dan partisipasi aktif masyarakat. Demikian pula halnya dengan proses perencanaan, ia mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang semakin besar pada tingkat nasional. Oleh karena itu, masyarakat desa perlu mengikuti irama perkembangan pelibatan publik dalam perencanaan anggaran. Berbagai bentuk perubahan terjadi seperti partisipasi melalui mekanisme partisipatif dari konsultasi pemangku kepentingan atau melalui undangan dengar pendapat publik. Kelompok komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok lain yang berkepentingan memanfaatkan ruang ini, sekaligus menciptakan ruang mereka sendiri. Ruang ini oleh Habermas dikenal dengan istilah *public sphere*, dimana dengan keberadaan ruang ini fokus partisipasi publik menjadi berubah arah yang semula bersifat implementasi keputusan menjadi pengambilan keputusan [3]. Fungsi *ruang publik* dan *ruang klaim* dalam partisipasi perencanaan anggaran desa menjadi sebuah arena yang mempengaruhi pengambilan keputusan, dimana ruang ini diisi oleh masyarakat. Permasalahan utama yang menjadi kendala perencanaan anggaran adalah masyarakat tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengemukakan saran dan gagasan dalam ruang publik ini. Umumnya, usulan kegiatan dibuat apa adanya dan dalam bentuk oral (lisan) tanpa tersedia dokumen pendukung seperti proposal. Tanpa dokumen yang resmi mengakibatkan usulan terabaikan karena tidak terdokumentasi oleh staf desa.

Sejauh menyangkut tata kelola desa, partisipasi publik telah didorong oleh lembaga bantuan internasional dan menjadi persyaratan pendanaan atas seluruh pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program yang didanai oleh mereka. Struktur partisipatif secara institusional diperkenalkan pertama kalinya melalui salah satu program besar yang didanai oleh UNICEF (*The Urban Basic Services Programme*), dimana program ini melibatkan partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara [4]. Program ini adalah program yang berpihak pada masyarakat dimana mereka mendapatkan layanan dasar seperti air, listrik, pengaspalan jalan, pengelolaan limbah padat, imunisasi, peningkatan pendapatan, dari instansi pemerintah yang ada melalui penciptaan struktur masyarakat seperti kelompok lingkungan dengan bantuan organisator masyarakat yang ditunjuk pemerintah. Semua program ini melibatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, sebagian besar struktur masyarakat yang ada tidak paham dengan konsep pembangunan dan bagaimana merancang sebuah usulan dan konsekuensinya adalah gagasan internasional tidak berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan pada keterlibatan dan swadaya gotong-royong masyarakat. Atas dasar itu maka kesadaran, peran serta, dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat

dalam pembangunan dapat dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama [4]. Makna partisipasi dan peran serta di sini bukan berarti bahwa masyarakat hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, dapat tercipta *sense of belonging* dan *sense of responsibility* dalam proses pembangunan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara teoretis, umumnya, tingkat keterlibatan publik menunjukkan tingkat keberpihakan yang diberikan kepada suara publik [5]. Pengembangan teori lebih lanjut menunjukkan bahwa partisipasi adalah pertukaran informasi antara masyarakat dengan pemerintahnya. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa konsultasi masih mendominasi hubungan di antara keduanya, di mana hubungan pertukaran pengetahuan tidak terjalin dengan baik. Partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) adalah model partisipasi yang mendukung pembentukan hubungan melalui keterlibatan, kolaborasi, atau pemberdayaan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka dapat menyumbangkan pengetahuannya dalam perencanaan pembangunan.

Dalam hal ini, suatu masyarakat dikatakan belum sejahtera jika masyarakat masih mengalami berbagai kekurangan baik secara material maupun spiritual. Karenanya, konsep pemberdayaan (*empowerment*) dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Flanagan, dkk. [6] mengatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Artinya, bukan pencapaian *tujuan* yang penting, tetapi proses dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian, maka tujuan pegabdian masyarakat ini adalah untuk: mendorong upaya keterlibatan masyarakat desa, melalui kemampuan mereka menuangkan ide-ide pemikirannya ke dalam bentuk tulisan atau proposal pembangunan untuk diajukan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diartikan agar ide masyarakat sejalan dengan visi dan misi pembangunan pemerintah sehingga ide yang tertuang dalam proposal dapat diterima oleh pemerintah daerah. Konsekuensinya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat meningkat.

1.1 Konsep Partisipasi

Konsep partisipatif mengandung makna luas dan arti yang amat dalam, dimana pada proses perencanaan pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan partisipasi dapat berfungsi pada fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan, penerimaan kembali hasil pembangunan dan fase penilaian pembangunan, sehingga partisipasi berfungsi menumbuhkan masyarakat untuk berkembang secara mandiri [7].

Lebih lanjut, partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat. Agar semangat partisipasi dapat tumbuh dan berkembang maka diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat. Partisipasi sebenarnya bukan sekadar perkumpulan masyarakat di satu tempat tertentu, melainkan sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan, serta turut bertanggung jawab terhadap usaha kelompok mencapai tujuan [8]. Ada tiga unsur penting yang dimaksud dalam definisi tentang partisipasi yang memerlukan perhatian khusus yaitu: (1) bahwa partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah; (2) ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, hal ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok

dengan segala nilainya; (3) unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota berarti ada: “*sense of belongings*”.

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi “label baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang pengimplementasiannya sehingga cenderung partisipasi kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta terlibat, atau proses belajar bersama untuk saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sekelompok anggota masyarakat [9].

Pada dasarnya, partisipasi dilandasi adanya pengertian bersama di antara orang-orang yang saling berkomunikasi dan berinteraksi sehingga tercipta suatu ruang yang bebas atau demokratis dimana kebersamaan terwujud [10]. Partisipasi dalam pembangunan berarti masyarakat ikut berperan serta dalam kegiatan perencanaan pembangunan, memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Namun, umumnya, partisipasi dipahami sebagai ketersediaan akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Jadi, partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah. [10] menyebutkan dua macam partisipasi yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan bawahan dengan atasan, antara klien dan patron atau antara masyarakat sebagai suatu komunitas dengan pemerintah dalam berbagai kegiatan politis misalnya pemungutan suara, kampanye dan sebagainya. Partisipasi demikian disebut sebagai partisipasi dalam proses politik.

Sementara, menurut [7], mereka mengelompokkan bentuk partisipasi berdasarkan situasi dan keperluan partisipasi sebagai berikut: (1) konsultasi dalam bentuk jasa; (2) sumbangan spontan berupa uang atau barang; (3) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga); (4) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komunitas (biasanya diputuskan dalam rapat komunitas, rapat desa saat menentukan besaran anggaran); (5) sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat; (6) aksi masa; (7) mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri; (8) membangun proyek komunitas yang bersifat otonomi.

Implementasi bentuk partisipasi memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta, karena peran serta atau partisipasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan di sekitarnya agar tujuan dapat tercapai. Proses peran serta atau partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk: (1) proses pengambilan keputusan; (2) menentukan kebutuhan yang diinginkan; dan (3) menunjukkan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai [2].

1.2 Definisi Proposal Kegiatan

Proses pembuatan proposal kegiatan pada dasarnya tidak jauh beda dengan arti proposal penelitian dimana dalam penyusunannya diperlukan perancangan suatu kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu, proposal dianggap sebagai langkah awal yang harus dipersiapkan ketika memulai suatu proyek atau kegiatan. Akan tetapi, proposal penelitian dan proposal kegiatan memiliki perbedaan yaitu keduanya menyajikan informasi yang berbeda. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diajukan, proposal penelitian menunjukkan permasalahan/fenomena sosial yang berbeda dengan konsep teoretisnya, sementara, proposal kegiatan menunjukkan permasalahan di lapangan atas kegiatan yang akan dilakukan. Informasi yang perlu ada dalam proposal kegiatan mencakup informasi terkait jadwal kegiatan, kebutuhan anggaran, susunan kepanitiaan untuk kegiatan tersebut, dan lain-lain. Namun, yang jelas perlu

ada dalam proposal kegiatan adalah tujuan, karena tujuan penting untuk meyakinkan pemberi dana. Proposal, karenanya, perlu disusun sedetail mungkin agar pihak yang dituju dapat memahami dan mengerti arti penting kegiatan yang akan dilakukan.

2. Metode Pelaksanaan

Purnomosidi, dkk. [3] menyatakan bahwa alternatif metode partisipatif untuk pengembangan masyarakat dibedakan ke dalam tiga jenis ilmu dan pengetahuan berdasarkan kepentingan atau fungsinya. Pertama, *empiris analitis*, yaitu membangun hubungan-hubungan kausal yang mendasar dalam kepentingan untuk mengontrol alam dan kepentingan teknis untuk menghasilkan informasi yang dapat menambah penguasaan teknis manusia. Kedua, *historis hermeneutis*, adalah kebutuhan manusia dalam melakukan komunikasi dengan penuh pengertian yang ditujukan untuk kepentingan praktis dan menghasilkan interpretasi yang memungkinkan suatu orientasi bagi tindakan praktis manusia ke dalam kehidupan bersama. Ketiga, *sosial kritis*, ditujukan untuk kepentingan emansipatoris yang menghasilkan analisis untuk membebaskan kesadaran manusia dari kungkungan dominasi kekuasaan dan struktural. Model penelitian aksi partisipatif sebagai alternatif metode dalam pengembangan masyarakat, memposisikan penguatan modal sosial sebagai tujuan utama dalam paradigma *historis-hermeneutis* dan dalam beberapa kasus mengarah pada sosial-kritis. Model Penelitian Aksi Partisipatif (PAP) mulai banyak digunakan oleh akademisi dan LSM di beberapa negara. Isu utama yang dikaji oleh metode ini sebagian besar ditujukan untuk isu-isu petani dan masyarakat miskin, pendidikan orang dewasa (andragogi), dan pemberdayaan masyarakat miskin. Siklus PAP yang diawali dengan siklus sosial alamiah masyarakat secara otomatis menggerakkan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh [11] bahwa terdapat tiga faktor yang menggerakkan masyarakat untuk berubah dari status laten menjadi status aktif. Ketiga faktor itu adalah: (1) pengenalan masalah yang menggambarkan taraf dimana orang sadar bahwa terdapat sesuatu yang hilang atau keliru dalam sebuah situasi, dengan demikian, orang sadar bahwa informasi sangat dibutuhkan; (2) pengenalan akan hambatan menggambarkan taraf dimana orang melihat diri mereka dibatasi oleh faktor eksternal versus melihat bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang berhubungan dengan situasi itu. Jika orang berpendapat bahwa mereka dapat melakukan perubahan atau memberi dampak pada situasi masalah, mereka akan mencari informasi untuk membuat rencana tindakan; serta (3) tingkat keterlibatan menggambarkan taraf dimana orang melihat diri mereka terlibat dan dipengaruhi oleh sebuah situasi. Dengan kata lain, semakin mereka melihat diri mereka terhubung dengan suatu situasi, maka semakin mungkin mereka untuk mengomunikasikannya.

Mengacu pada pendapat [11], dapat disimpulkan bahwa aspek partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam sebuah proses sosial. Partisipatif merupakan kata kunci dalam PAP yang menjadi prinsip utama dari seluruh aktivitas pembangunan masyarakat dimana ia dapat menggerakkan masyarakat mulai dari awal sampai dengan akhir dari proses pembangunan sosial.

Pengabdian ini menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terfokus sebagai alat dalam melaksanakan pelatihan dalam pengabdian. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari hasil interaksi informan atau responden dalam suatu kelompok diskusi terfokus yang membahas dan menyelesaikan permasalahan tertentu. Menurut [12] adalah suatu eksplorasi isu/fenomena khusus dalam diskusi kelompok yang berfokus pada aktivitas bersama di antara para individu yang terlibat, dengan tujuan untuk menghasilkan kesepakatan bersama. [13]–[15] memiliki pandangan yang senada tentang metode FGD, mereka mendefinisikan bahwa metode FGD sebagai suatu metode untuk memperoleh produk data/informasi melalui interaksi sosial sekelompok individu yang dalam interaksi tersebut, sesama individu saling memengaruhi satu dengan lainnya. Lebih rinci, [13] menjelaskan bahwa interaksi sosial sekelompok individu tersebut dapat saling memengaruhi dan

menghasilkan data/informasi jika memiliki kesamaan pandangan, antara lain memiliki kesamaan karakteristik individu secara umum, kesamaan status sosial, kesamaan isu/ permasalahan, dan kesamaan relasi/hubungan secara sosial.

Selain kelebihan yang dimilikinya sebagai alat pengumpul data, metode FGD memiliki sejumlah karakteristik [15] yaitu aktivitasnya bersifat objektif dan eksternal. Karakteristik permasalahan yang dibahas dalam metode FGD adalah isu tentang berbagai cara yang membentuk perilaku dan sikap sekelompok individu atau untuk mengetahui persepsi, wawasan, dan penjelasan tentang isu sosial yang tidak bersifat personal, umum, dan tidak mengancam kehidupan pribadi seseorang [15]. Dengan demikian, tidak semua permasalahan dapat dibahas dan datanya terkumpul melalui metode FGD, seperti topik yang bersifat sangat personal yaitu isu-isu sensitive kehidupan pribadi, status Kesehatan, kehidupan seksual, masalah keuangan, dan agama yang bersifat personal [15].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Permasalahan Wilayah

Desa Bontoparang merupakan salah satu desa di Kabupaten Takalar yang telah melaksanakan mekanisme proses perencanaan pembangunan daerah. Secara formal, masyarakat di desa telah berpartisipasi dalam proses musrenbang karena menurut mereka keikutsertaan dalam musrenbang dapat bermanfaat bagi pembangunan desa. Namun, masalah yang ditemukan oleh tim pengabdian di lapangan adalah antusiasme keterlibatan masyarakat dalam mekanisme proses perencanaan pembangunan di Desa Bontoparang tidak maksimal. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kehadiran peserta musrenbang dari tahun ketahun mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sejumlah 44 orang yang hadir dalam rapat desa, tahun 2019 sejumlah 40 orang dan di tahun 2020 sejumlah 30 orang.

Di samping itu, masyarakat senantiasa dihadapkan pada acara seremonial ketika proses pemberian masukan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Pemerintah pada acara *musrenbang*, mengajukan dokumen proposal kegiatan desa yang anggarannya telah ditentukan dan masyarakat hanya menjadi pendengar atas uraian yang disampaikan oleh pemuka desa dan kecamatan. Pada akhirnya, masyarakat tinggal menyetujui dan mempercayakan hasilnya kepada pemerintah kecamatan. Akan tetapi pada kenyataannya, beberapa kebijakan pemerintah tidak memihak kepada masyarakat dan sangat jauh berbeda dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti yang terjadi pada proyek pembangunan puskesmas desa di Desa Bontoparang yang menuai protes dari masyarakat, hal ini disebabkan pemerintah membangun kantor di atas lahan yang digunakan sebagai lapangan olahraga oleh masyarakat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sebelum pemerintah memulai proyek pembangunan, pemerintah tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Artinya, pemerintah telah mengesampingkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

3.2 Penyusunan Usulan Proyek

Langkah pertama yang perlu dirumuskan secara baik oleh masyarakat desa (peserta pengabdian) adalah pemilihan topik kegiatan. Topik kegiatan dalam penulisan proposal sebaiknya disesuaikan dengan prioritas penyanggah dana yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah daerah telah menguraikan bidang-bidang prioritas yang akan mereka lakukan dimana prioritas ini sejalan dengan visi misi daerah. Berdasarkan prioritas yang ada, maka masyarakat desa harus melaksanakan pengamatan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi bidang-bidang prioritas yang sesuai dengan permasalahan di sekitar mereka. Pada umumnya, pemerintah memberikan prioritas pada proyek-proyek kegiatan yang melibatkan masyarakat, terutama proyek pembangunan fisik, kesehatan, dan pendidikan, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Setelah peserta mengidentifikasi prioritas daerah yang

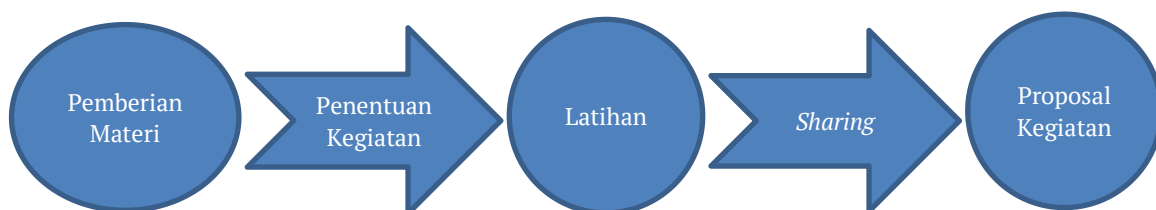
sesuai dengan permasalahan di sekitar, maka ditetapkan usulan topik kegiatan dalam penulisan proposal. Gambar 1 memperlihatkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

Pada saat membuat proposal (usulan) kegiatan, masyarakat membuat judul kegiatan yang disusun dengan rapi dan mencakup: (1) judul proyek kegiatan; (2) nama orang/tim pengusul; (3) nama pembina/mitra; dan (4) tanggal penyerahan usulan proyek. Judul kegiatan harus terlihat profesional, rapi, dan menarik perhatian pembaca, namun demikian tidak berarti bahwa sampul laporan proposal kegiatan harus mewah, penjuridan mahal, atau adanya prosedur-prosedur lain yang dapat disalah artikan dari usulan kegiatan yang masyarakat ajukan ke pemerintah. Jadi, poin yang ingin digarisbawahi di sini adalah masyarakat desa harus memberi kesan kepada pemerintah bahwa usulan kegiatan mereka sangat potensial, dibutuhkan karena merupakan kepentingan bersama, dan oleh karenanya, pendanaan sangat diharapkan. Kesan bahwa usulan masyarakat adalah sesuatu yang sia-sia dan mahal hendaknya dihindari. Penting untuk diingat oleh masyarakat yang ingin mengusulkan proyek kegiatan adalah pikirkan judul sebagai sesuatu yang abstrak-mini. Artinya, judul yang baik harus mampu melukiskan gambaran singkat kondisi lapangan sehingga pembaca utama sudah mendapat pemahaman dengan hanya membaca judul proposal. Judul diupayakan hanya menggunakan satu kalimat saja dan tidak terlalu panjang sehingga sulit dimengerti terkait apa yang ingin masyarakat lakukan. Apabila hal ini susah dihindari, maka perlu menggunakan dua bagian judul yang setiap bagian dari judul dipisahkan oleh titik dua. Masyarakat desa dapat menggunakan hal ini sebagai suatu pilihan terakhir. Ini hindaknya tidak dilakukan untuk menggambarkan abstrak dari keseluruhan proposal. Alur kegiatan pelatihan dapat dijelaskan pada Gambar 2.

Langkah selanjutnya adalah masyarakat mendeskripsikan masalah yang ada. Masalah yang diuraikan dalam proposal meliputi latar belakang, alasan, dan keunggulan komparatif dari kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, perlu untuk menjelaskan permasalahan yang ingin diselesaikan, pentingnya permasalahan tersebut, ukuran dan pertanyaan/tindakan yang memandu masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Ukuran yang dimaksud berkaitan dengan relevansi masalah baik secara global, regional, atau lokal.



Gambar 1. Pelaksanaan FGD Penyusunan Proposal Kegiatan Pembangunan



Gambar 2. Alur Kegiatan Pelatihan

Langkah akhir adalah lampiran proposal yaitu anggaran karena anggaran pemerintah jumlahnya terbatas sementara banyak kegiatan yang akan dibiayai. Oleh karena itu, masyarakat perlu menghitung dengan baik berapa total anggaran yang dibutuhkan dan kegiatan apa yang dibiayai oleh pemerintah. Anggaran yang diajukan hendaknya serealistis mungkin. Perlu diingat bahwa pemerintah menerima banyak permintaan pendanaan kegiatan. Pemerintah dapat dengan mudah mengetahui apabila seseorang menggelembungkan anggaran karena pengalaman yang mereka miliki. Melalui FGD, perumusan proposal ini dilakukan secara menyeluruh, data-data yang dibutuhkan dikumpulkan oleh masyarakat dan selanjutnya masyarakat menyusun secara bersama sebuah proposal yang masuk akal dan relevan dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

4. Kesimpulan

Masyarakat penerima program perlu memahami cara menuangkan ide dan gagasan mereka agar keterlibatan mereka dalam mekanisme *musrenbang* dapat meningkat. Ide dan gagasan masyarakat dituangkan dalam bentuk proposal yang nantinya akan dibicarakan dalam proses perencanaan program pembangunan. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pelatihan kepada masyarakat desa, khususnya kaum pemuda, agar mereka dapat menganalisis situasi permasalahan desanya. Pelatihan memungkinkan peserta (masyarakat desa) membuat proposal kegiatan yang disinkronkan dengan perencanaan desa. Kemudian, mereka menuangkannya ke dalam bentuk proposal yang baik dan tepat sasaran. Manfaat yang diperoleh masyarakat setelah mengikuti pelatihan adalah tambahan pengetahuan dalam membuat proposal yang dapat diajukan kepada pemerintah daerah (investor) untuk mengembangkan usaha kecil mereka. Saat artikel ini ditulis, masyarakat telah mengajukan tiga proposal yang diajukan kepada BUMD terkait dengan usaha mikro mereka.

Saran pengabdian ini yakni saat penyusunan proposal kegiatan, masyarakat perlu menganalisis situasi desa secara lebih detail yang nantinya dituangkan dalam usulan kegiatan proyek. Bentuk pembuatan proposal yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat desa agar usulan mereka dalam kegiatan *musrenbang* desa dapat dipertimbangkan. Bagi pemerintah, perlu untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mekanisme proses perencanaan pembangunan yang bukan hanya sekadar sebagai pendengar atas usulan pemerintah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui skema Pengabdian kepada Masyarakat Program Kemitraan sesuai dengan kontrak no: 916/UN4.22/PM.01.01/2021 per tanggal 12 April 2021.

Daftar Pustaka

- [1] K. Coelho, L. Kamath, and M. Vijayabaskar, *Participolis: Consent and Contention in Neoliberal Urban India*. New Delhi: Routledge, 2013.
- [2] R. Damayanti and S. Syarifuddin, "The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia," *Development in Practice*, vol. 30, no. 5, 2020, doi: 10.1080/09614524.2020.1752151.
- [3] R. M. Purnomosidi, I. Triuwono, and A. Kamayanti, "PEMBEBASAN ETOS AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH ANALISIS KRITIS HABERMASIAN ATAS KOLONISASI LIFEWORLD," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, vol. 19, no. 1, pp. 132–135, Sep. 2015, doi: 10.24034/j25485024.y2015.v19.i1.68.

- [4] J. Gaventa, "Exploring Citizenship, Participation and Accountability," *IDS Bulletin*, vol. 33, no. 2, pp. 1–14, Apr. 2002, doi: 10.1111/j.1759-5436.2002.tb00020.x.
- [5] V. Monno and A. Khakee, "Tokenism or Political Activism? Some Reflections on Participatory Planning," *International Planning Studies*, vol. 17, no. 1, pp. 85–101, Feb. 2012, doi: 10.1080/13563475.2011.638181.
- [6] C. A. Flanagan, L. S. Galloway, S. Gill, E. Galloway, and N. Nti, "What Does Democracy Mean? Correlates of Adolescents' Views," *Journal of Adolescent Research*, vol. 20, no. 2, pp. 193–218, Mar. 2005, doi: 10.1177/0743558404273377.
- [7] A. Fung, "Varieties of Participation in Complex Governance," *Public Administration Review*, vol. 66, pp. 66–75, Dec. 2006.
- [8] H. Nez, "Does participation mean reciprocal learning? The relationships between diverse stakeholders during participatory budgeting in Paris," *Journal of Civil Society*, vol. 12, no. 3, pp. 266–281, Jul. 2016, doi: 10.1080/17448689.2016.1215371.
- [9] "Final Report: Appraisal of Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JnNURM)," *Grant Thornton India*, 2011. <http://jnnurm.nic.in/wp-content/uploads/2012/06/Appraisal-of-JnNURM-Final-Report-Volume-I-.pdf> (accessed Oct. 15, 2015).
- [10] J. E. Innes and D. E. Booher, "Reframing public participation: strategies for the 21st century," *Planning Theory & Practice*, vol. 5, no. 4, pp. 419–436, Dec. 2004, doi: 10.1080/1464935042000293170.
- [11] S. M. Cutlip, A. H. Center, and G. M. Broom, *Effective Public Relations*, 8th ed. Madison: Prentice Hall International, Inc, 2000.
- [12] P. A. Leal, "Participation: the ascendancy of a buzzword in the neo-liberal era," *Development in Practice*, vol. 17, no. 4–5, pp. 539–548, Aug. 2007, doi: 10.1080/09614520701469518.
- [13] J. A. Hollander, "The Social Contexts of Focus Groups," *Journal of Contemporary Ethnography*, vol. 33, no. 5, pp. 602–637, Oct. 2004, doi: 10.1177/0891241604266988.
- [14] W. Duggleby, "What About Focus Group Interaction Data?," *Qualitative Health Research*, vol. 15, no. 6, pp. 832–840, Jul. 2005, doi: 10.1177/1049732304273916.
- [15] P. Lehoux, B. Poland, and G. Daudelin, "Focus group research and 'the patient's view,'" *Social Science & Medicine*, vol. 63, no. 8, pp. 2091–2104, Oct. 2006, doi: 10.1016/j.socscimed.2006.05.016.

Afiliasi:

Syarifuddin^{1,*}, Ratna Ayu Damayanti², Mahlia Muis³, Cipi Pahlevi⁴

Universitas Hasanuddin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea, Makassar, Indonesia

Email : ¹syari1963@yahoo.com, ²damayantiss@yahoo.co.id, ³mahliamuis@gmail.com,
⁴cepipahlevi@gmail.com

URL : <https://orcid.org/0000-0002-7880-9331>